ngo
id
cn=humas@dprd-bungokab.go.id
e=humas@dprd-bungokab.go.id
Reason: I am approving this document
Location:
Date: 2019-11-19 21:00+07:00

SALINAN

RISALAH RESMI

Tahun	:	2019
Jenis Rapat	:	Rapat Paripurna
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari / Tanggal	:	Rabu, 25 September 2019
Pukul	:	10.00 Wib s/d Selesai
Tempat	:	Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kabupaten Bungo
Pimpinan Rapat	:	Martunus, A.Md/ Ketua Sementara DPRD Didampingi:
Acara	:	Penyampaian Nota Pengatar Bupati Bungo Atas Ranperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019
Sekretaris Rapat	:	Dra. Ulfa Novriza, M.Si/ Sekretaris DPRD
Hadir	:	A. 31 dari 35 orang Anggota DPRD, dengan rincian:

1. **Fraksi Gerindra**
   4 dari 4 orang Anggota
2. **Fraksi Nasdem**
   0 dari 4 orang Anggota
3 **Fraksi PAN**
   4 dari 4 orang Anggota
4. **Fraksi PKS**
   4 dari 4 orang Anggota
5. **Fraksi Demokrat**
   2 dari 3 orang Anggota
6. **Fraksi Hanura**
   3 dari 3 orang Anggota
7. **Fraksi PDI-Pejuangan**
   3 dari 3 orang Anggota
8. **Fraksi PKB**
   3 dari 3 orang Anggota
9. **Fraksi Pembangunan Berkarya**

4 dari 4 orang Anggota

10. Fraksi Karya Bintang Indonesia

3 dari 4 orang Anggota

Izin : 4 Orang

B. Sekretariat DPRD :

1. Agus Kusnandar, SH / Kabag Persidangan dan Per-UU
2. Indra Yani, S.Pd. MM / Kabag Umum dan Keuangan
3. Usman, S.Pd / Kabag Fasilitasi, Penganggaran dan Pengawasan
4. Melliyantikasari, SH/ Kasubbag Kerjasama dan Aspirasi
5. Irayana, SH / Kasubbag Persidangan dan Risalah
6. Rizamsir, SH / Humas Protokol dan Publikasi
7. M. Marhabi

Turut Hadir : 1. Bupati Bungo
2. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bungo
3. Para Staf Ahli Bupati Bungo, Para Asisten Sekda, dan Kepala Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo;
4. Kepala OPD dan Pimpinan BUMD/BUMN dalam Kab. Bungo;
5. Pimpinan Perguruan Tinggi dalam Kabupaten Bungo
7. Para Camat dan Lurah dalam kabupaten Bungo;
8. Rekan-rekan Wartawan

Pembawa Acara : Fitri Verawati / Staf Sekretariat DPRD

Jalannya Rapat : Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri / hadirin dipersilahkan duduk kembali.

Rapat hari ini dipimpin oleh Ketua Sementara DPRD Kabupaten Bungo.

Kepada Bapak Martunis, A.Md disilahkan dengan segala hormat;

Pimpinan Rapat : Martunis , A.Md / Ketua Sementara DPRD Kab. Bungo

(Rapat di buka pukul 11.00 Wib)

Assalamuaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua.

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

Sebelum Rapat Paripurna hari ini saya buka, diminta kepada Sekretaris Dewan untuk membacakan daftar hadir anggota Dewan.

Kepada Sekretaris Dewan dipersilahkan.

--- Sekwan Membacakan Daftar Hadir ---

Terima kasih kepada Sekretaris DPRD yang telah membacakan Daftar hadir Anggota DPRD.

Sesuai dengan laporan Sekretaris DPRD tadi bahwa dari jumlah 35 orang Anggota Dewan, yang hadir secara fisik dan telah menandatangani daftar hadir berjumlah 31 orang, maka untuk pelaksanaan paripurna Penyampaian Nota Pengantar Bupati Bungo atas Ranperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019, berlaku ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (b) Peraturan DPRD Kabupaten Bungo Nomor 1 Tahun 2018, yaitu dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota. Dengan demikian quorum telah tercapai dan rapat paripurna hari ini dapat dilanjutkan.

Dengan mengucapkan "Bismillahirohmanirohhim" Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bungo dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Bupati Bungo atas Ranperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019, secara resmi dibuka dan terbuka untuk umum.

---- Ketukan Palu 3 X -----

Saudara Bupati dan Wakil Bupati Bungo

Pimpinan dan Anggota Dewan Yth.

Yth. Saudara Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bungo.

Yth. Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo.

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

Yth. Saudara Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo.

Yth. Kepala Perangkat Daerah, Pimpinan Instansi Vertikal, Kepala Badan dan Pimpinan BUMD / BUMN dalam Kabupaten Bungo.

Yth. Saudara Camat dan Lurah dalam Kabupaten Bungo.

Rekan-rekan Wartawan serta hadirin yang berbahagia.

Pada kesempatan yang baik ini Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan, untuk hadir Bersama diruangan ini, melaksanakan Rapat Paripurna DPRD.

Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad S.A.W, semoga kita mendapatkan safa'atnya di Yaumil mahsyar. Aamiin..

Saudara Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 154 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana Perubahan APBD dapat dilaksanakan apabila terjadi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran Anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
d. Keadaan darurat ; dan
e. Keadaan luar biasa.

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

Berkenaan dengan hal di atas, maka telah ditangdatangani Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Bungo dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditandatangani oleh Bupati Bungo dan Pimpinan DPRD Kabupaten Bungo pada tanggal 16 Agustus 2019 Masa Jabatan 2014 - 2019 tentang Prioritas dan Flapon Anggaran Perubahan APBD TA 2019, dengan nominal penambahan Anggaran sebesar Rp. 3.851.394.630,- (Tiga Miliyar Delapan Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah).

Saudara Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia.

Selanjutnya mari kita dengarkan dan simak bersama Nota Pengantar Bupati Bungo atas Ranperda tentang APBD Perubahan Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2019.

Bupati Bungo: **H. MASHURI, SP, ME**

Assalamualaikum Wr Wb, Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

- Yth. Sdr. Ketua, Wakil Ketua dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Bungo;
- Yth. segenap anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo dan Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo;
- Sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten dan seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo;
- Para hadirin dan undangan yang berbahagia.

Kecik Benamo, Gedang Begelar,
Nan kecik idak disebut namonyo,
Nan gedang idak diimbau gelarnyo.

Mengawali sambutan ini, marilah kita memanjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan dan

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita diberikan kesehatan untuk hadir di ruangan ini, dalam rangka Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bungo, dengan agenda **Penyampaian Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2019**.

Selanjutnya, shalawat teriring salam marilah senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia ke alam yang terang benderang, penuh dengan khasanah ilmu pengetahuan, sebagaimana kita rasakan saat ini.

Pimpinan dan Anggota Dewan Yang Terhormat, serta hadirin yang berbahagia.

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA. 2019 ini merupakan bagian dari rangkaian siklus pengelolaan keuangan daerah. Beberapa waktu lalu, kita telah melewati siklus Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2018, dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berbeda dengan periode sebelumnya, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2018 tersebut, yang merupakan hasil dari pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jambi, dengan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Perolehan opini WTP ini merupakan yang pertama kali, sejak dilakukannya pemeriksaan oleh BPK atas LKPD TA 2004. Seiring dengan itu, sehari yang lalu telah terbit surat Menteri Keuangan Nomor S-702/MK.07/2019 tanggal 24 September 2019 perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020, yang ternyata opini WTP tersebut membuahkan hasil berupa alokasi Dana Insentif Daerah (DID) untuk TA 2020 sebesar **Rp10,4 Milyar lebih**. Oleh karena itu, sudah

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

sepatutnya kita syukuri bersama, dan tentunya menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Pimpinan dan Anggota Dewan Yang Terhormat, serta hadirin yang berbahagia.

Kembali pada agenda kita kali ini, dapat disampaikan, bahwa Rapat Paripurna hari ini dan dilanjutkan dengan Rapat Paripurna berikutnya, merupakan bagian dari serangkaian mekanisme Perubahan APBD. Menurut ketentuan Pasal 316 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, lebih lanjut diperjelas oleh Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2019, terdapat lima kondisi yang melatarbelakangi Perubahan APBD, yakni :

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
d. keadaan darurat; dan/atau
e. keadaan luar biasa.

Merujuk pada aturan tersebut, beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 16 Agustus 2019, telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Bupati Bungo dengan DPRD Kabupaten Bungo tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD TA 2019. Seiring dengan itu, sesuai Berita Acara yang ditandangani oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bungo tertanggal 16 Agustus 2019, disepakati

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

bahwa penambahan murni atas anggaran belanja langsung adalah sejumlah **Rp3,85 Milyar lebih**.

Tahapan berikutnya, seperti dimaklumi bersama, bahwa setelah penandatanganan Nota Kesepakatan tersebut, mekanisme Perubahan APBD TA 2019 untuk sementara waktu tidak berlanjut. Hal ini diantaranya karena DPRD Kabupaten Bungo periode 2014-2019 telah mendekati akhir masa tugas. Syukur alhamdulillah, berdasarkan surat Pimpinan DPRD Kabupaten Bungo periode 2019-2024, nomor 170/804/DPRD tanggal16 September 2019, mekanisme Perubahan APBD TA 2019 kembali bergulir, dan dilanjutkan hingga hari ini.

Pimpinan dan Anggota Dewan Yang Terhormat, serta hadirin yang berbahagia.

Sebagai salah satu bagian dari dokumen perencanaan anggaran, Nota Kesepakatan KUPA tersebut di atas merupakan pedoman awal bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2019, yang selanjutnya dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya, sehingga menghasilkan Nota Kesepakatan baru yakni Nota Kesepakatan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2019.

Berdasarkan formulasi yang dilakukan terhadap lima kondisi yang menjadi latar belakang Perubahan APBD, serta memperhatikan kebutuhan dan dalam dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka postur anggaran yang termuat dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, dapat disampaikan secara garis besar sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan semula sebesar Rp1,37 Triliyun lebih, direncanakan bertambah sejumlah Rp184 Milyar lebih sehingga menjadi Rp1,56 Triliyun lebih;

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

2. Anggaran Belanja semula sebesar Rp1,61 Triliyun lebih, direncanakan bertambah sejumlah Rp11,01 Milyar lebih sehingga menjadi Rp1,62 Triliyun lebih.

Penambahan anggaran pendapatan tersebut di atas, secara garis besar terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah direncanakan bertambah sejumlah Rp34,96 Milyar lebih;
2. Dana Perimbangan direncanakan bertambah sejumlah Rp133,10 Milyar lebih;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah direncanakan bertambah sejumlah Rp16,17 Milyar lebih.

Berikutnya, penambahan anggaran belanja tersebut di atas, berasal dari pengurangan anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp8,39 Milyar lebih, dan penambahan anggaran belanja langsung sebesar Rp19,40 Milyar lebih. Secara garis besar rencana penambahan anggaran belanja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pengurangan anggaran belanja tidak langsung sejumlah Rp8,39 Milyar lebih, terdiri dari :

1. Penggeseran anggaran belanja tidak terduga ke dalam anggaran belanja langsung pada kegiatan tertentu sejumlah Rp8,71 Milyar lebih, dan penggeseran anggaran belanja tidak terduga ke dalam anggaran belanja hibah sejumlah Rp321,53 juta lebih, untuk keperluan tahapan pelaksanaan pilkada KPUD Kabupaten Bungo dan Bawaslu Kabupaten Bungo di tahun 2019 berpedoman pada Surat Edaran Mendagri Nomor 900/9629/SJ tanggal 18 September 2019. Penggeseran anggaran tersebut telah dilakukan tiga kali, melalui mekanisme mendahului perubahan APBD, dimana sesuai aturan yang berlaku, hal tersebut dituangkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD TA 2019;

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

2. Penggeseran dalam anggaran belanja tidak langsung antar OPD guna penyesuaian alokasi anggaran Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan PNS (TPP), dimana setelah dilakukan evaluasi dan dihitung kembali ternyata terdapat beberapa OPD yang perlu disesuaikan kembali jumlah alokasi anggaran untuk itu.

Pimpinan dan Anggota Dewan Yang Terhormat, serta hadirin yang berbahagia.

Terhadap anggaran belanja langsung, direncanakan terdapat penambahan anggaran sejumlah Rp19,40 Milyar lebih, meliputi dua komponen besar, yakni :

1. Penambahan murni sejumlah Rp3,85 Milyar lebih, mengacu pada Berita Acara tertanggal 16 Agustus 2019 sebagaimana telah disebutkan di atas;
2. Penambahan yang berasal dari penggeseran anggaran belanja tidak terduga dan penggeseran dalam anggaran belanja langsung antar jenis, antar kegiatan dan antar OPD dalam rangka optimalisasi dan penyesuaian kebutuhan anggaran tahun berjalan, seluruhnya berjumlah Rp15,55 Milyar lebih;

Pimpinan dan Anggota Dewan Yang Terhormat, serta hadirin yang berbahagia.

Kemudian, untuk anggaran pembiayaan, terdapat perubahan pada angka SiLPA, semula diperkirakan SiLPA Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp237,98 Milyar lebih. Berdasarkan hasil audit BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi atas LKPD Kbupaten Bungo TA 2018, maka telah diperoleh angka SiLPA sebesar Rp64,74 Milyar lebih, terdiri dari :

- Sisa Dana Tidak Mengikat (Dana Umum) sebesar Rp28,94 Milyar lebih;
- Sisa Dana Mengikat (seperti DAK, DBH, DD, Pajak Rokok dan CHT serta Bantuan Keuangan Dari Provinsi) sebesar Rp25,16

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

Milyar lebih yang peruntukannya tidak bisa digunakan untuk program dan kegiatan lain; dan

- Kas di Bendahara penerima Organisasi Perangkat Daerah sebesar Rp10,63 Milyar lebih.

Pimpinan dan Anggota Dewan Yang Terhormat, serta hadirin yang berbahagia.

Pada kesempatan ini perlu juga disampaikan, bahwa sesuai Permendikbud Nomor 31 Tahun 2019 Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja tanggal 5 September 2019, Kabupaten Bungo memperoleh alokasi untuk pendanaan BOS Afirmasi SD dan SMP sebesar Rp18,1 Milyar lebih dan BOS Kinerja dari pusat sejumlah Rp1,65 Milyar lebih Mengingat hingga saat ini belum diperoleh rincian atas belanja BOS tersebut, maka belum dimasukan dalam dokumen rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2019 ini. Dengan demikian, penganggaran dalam Perubahan APBD ini akan dilakukan pada saat tahapan evaluasi oleh TAPD Provinsi Jambi, termasuk di dalamnya penyesuaian kembali beberapa komponen anggaran pendapatan dan belanja lainnya.

Pimpinan dan Anggota Dewan Yang Terhormat, serta hadirin yang berbahagia.

Berdasarkan persetujuan bersama antara Bupati Bungo dan DPRD Kabupaten Bungo terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2019 nantinya, tahapan berikutnya adalah evaluasi oleh Gubernur dalam rangka penyempurnaan lebih lanjut. Hal tersebut berpedoman pada ketentuan Pasal 314, Pasal 315 dan Pasal 319 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan diperkuat dengan Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2019.

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

Pimpinan dan Anggota Dewan Yang Terhormat, serta hadirin yang berbahagia.

Demikianlah gambaran umum mengenai rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2019. Merujuk pada ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hendaknya diperoleh persetujuan bersama dalam rapat paripurna terakhir sesuai jadwal yang telah ditetapkan, dan paling lambat 30 September 2019. Selanjutnya, perlu juga disampaikan, bahwa dalam waktu dekat kita sudah dihadapkan pada agenda penting tahunan, yakni pembahasan RAPBD TA. 2020, dimana paling lambat 30 November 2019 mesti diperoleh persetujuan bersama.

Dalam kaitan itu, belajar dari pengalaman yang baru saja berlalu, di masa yang akan datang hendaknya Pemerintah Daerah bersama DPRD memiliki Kalender Anggaran Bersama. Hal ini dikarenakan setiap tahun terdapat tiga agenda besar dalam siklus pengelolaan keuangan daerah, yakni penyusunan dan penetapan APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Masing-masing agenda tersebut memiliki tahapan yang cukup panjang sesuai mekanisme yang berlaku. Dengan adanya Kalender Anggaran Bersama tersebut, diharapkan setiap tahapan dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu perlu dibangun hubungan kerja yang lebih sinergis, saling menguatkan satu sama lain, sesuai kato adat **Bak Aur Dengan Tebing**. Selanjutnya, secara tegas dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan, bahwa **penyelenggara pemerintahan daerah adalah Kepala Daerah dan DPRD dibantu Perangkat Daerah**.

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

Pimpinan dan Anggota Dewan Yang Terhormat, serta hadirin yang berbahagia.

Akhirnya, pada kesempatan yang berbahagia ini, perlu disampaikan pula kepada Anggota Dewan Yang Terhormat, sekiranya dibutuhkan penjelasan dan tambahan informasi berkenaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ini, dipersilakan untuk mengundang OPD terkait diantaranya melalui forum Rapat Dengar Pendapat. Sebaliknya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama seluruh Kepala OPD telah diinstruksikan agar senantiasa siap untuk memberikan penjelasan maupun klarifikasi. Dengan demikian, diharapkan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2019 ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya, sesuai kato adat **bulek aek dek pembuluh, bulek kato dek mufakat.**

Untuk itu, ke depan hendaknya kita **Langkah Serentak Limbai Seayun,** sesuai semboyan kito bersamo**.** Semua itu tidak lain untuk kemajuan Kabupaten Bungo, dan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bungo, dalam bingkai **Bungo Maju** dan **Sejahtera,** sesuai pantun berikut ini.

Buah Cempedak Di Tepi Hutan

Dibawa Pulang Dibuat Gulai

Dukungan Anggota Dewan Selalu Diharapkan

Supaya Bungo Maju Sejahtera Dapat Tercapai

Nak duo pantun seiring.

Sebelum Fajar Sungguhlah Elok bertahajud

Terdengar Azan Ke Masjid Berduyun-duyun

Bungo Master Akan Dapat Terwujud

Bilo Kito Langkah Serentak Limbai Seayun

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf, serta atas segala perhatiannya tidak lupa kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT meridhoi usaha dan kerja keras kita bersama.

Billahi Taufik Walhidayah,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pimpinan Rapat **:** Terima kasih kepada Bupati Bungo yang telah menyampaikan Nota Pengantar Bupati Bungo atas Ranperda APBD Perubahan Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2019.

Pembawa Acara **:** Kepada Yth Bupati Bungo dan Wakil Bupati Bungo serta Pimpinan DPRD dimohon menuju tempat yang telah ditentukan
Kepada Yth Bupati Bungo dan Wakil Bupati Bungo serta Pimpinan DPRD dimohon kembali ketempat semula

Penyerahan Nota Pengantar dari Bupati kepada Pimpinan DPRD

Pimpinan Rapat **:** Saudara Bupati, Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia Pada kesempatan ini kami mengajak kita semua untuk memberikan dukungan kepada Pemerintah Daerah agar dapat memenuhi target rencana penerimaan yang disusun dan merealisasikan program dan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Kepada rekan-rekan Pimpinan dan Anggota Dewan, saya mengharapkan dukungannya dengan tetap melaksanakan fungsi pengawasan DPRD khususnya pengawasan terhadap Perubahan APBD sehingga program atau kegiatan yang telah dianggarkan dapat berjalan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan.

Saudara Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia.

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

Demikian Rapat Paripurna DPRD pada hari ini, sebelum acara ini di skor atas nama Pimpinan saya mengundang Bapak/Ibu serta hadirin untuk hadir kembali diruangan ini pada Rapat Paripurna dengan Agenda Penyampaian Kata Akhir Fraksi yang akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 30 September 2019, Pukul 09.00 Wib.

Akhirnya dengan mengucapkan "Alhamdulillahirrabbil' alamiin" Rapat Paripurna DPRD hari ini secara resmi saya skor, Semoga Allah SWT meridhoi semua niat dan usaha baik kita Bersama.

---- Ketukan Palu 1 X ----

Sekian terima kasih.
Wabillahitaufiq Walhidayah.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembawa Acara: Hadirin yang berbahagia demikian seluruh rangkaian acara pada hari ini terimakasih

Wabillahi taufik walhidayah,
Wassalamualaikum Wr Wb.

Muara Bungo 25 September 2019
DPRD KABUPATEN BUNGO
Ketua Sementara,

MARTUNIS, A. Md

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

DOKUMENTASI






DHARMAWAN, S.H
H. DJUSRI, S.E, M.Si


RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO
PENYAMPAIAN NOTA PENGANTAR BUPATI BUNGO
TERHADAP RANPERDA APBD-P TAHUN ANGGARAN 2019
MUARA BUNGO, 25 SEPTEMBER 2019




RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO